

BERLAYAR DENGAN EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KINERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN 2020-2024



BERLAYAR DENGAN EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KINERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN 2020-2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Kaleideskop KKP 2020-2024

BAB • 01

Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

BAB • 02

Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB • 03

Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB • 04

Torehan Prestasi



"Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang berperan dalam menjaga keberlangsungan dan menjamin siklus hidup, rantai makanan, memberikan efek *spillover* untuk mendukung ketersediaan stok sumber daya ikan, episentrum serapan karbon dunia, dan produsen oksigen bagi kehidupan."

PETA JALAN EKONOMI BIRU Menuju Indonesia Emas 2045



Pengantar



aporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 disusun untuk menyampaikan hasil-hasil kinerja yang telah dilakukan oleh KKP dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan. Selain itu diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang apa yang sudah kita jalankan untuk mengawal program dan kegiatan pembangunan KKP periode 2020-2024.

KKP berkomitmen terus berbenah diri untuk melakukan berbagai terobosan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Pengelolaan berkelanjutan berbasis ekonomi biru merupakan pendekatan holistik yang mengedepankan keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem laut, pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, dan peningkatan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan difokus pada 5 kebijakan pengelolaan berkelanjutan berbasis ekonomi biru yaitu:

Memperluas kawasan konservasi laut, Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

KKP terus memperbaiki sistem tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan serta bertransformasi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuju negara maritim yang diperhitungkan.

Jakarta, Oktober 2024

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Menteri Kelautan dan Perikanan

23 Desember 2020

Bapak Sakti Wahyu Trenggono dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan

23 Desember 2020 Mengunjungi KKP setelah dilantik

Kaleidoskop KKP 2020-2024

2020







Nizam Zachman





23 Desember 2020 Rakor Perdana MKP pada Rakor Tingkat Menteri Bidang Perekonomian tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)



28 Desember 2020Perpisahan
Bapak Sakti Wahyu Trenggono
dari Kemenhan



28 Desember 2020MKP mengunjungi Pusat
Pengendalian (PUSDAL)

7 Januari 2021

Meresmikan pembangunan dan rehabilitasi 13 klaster tambak udang di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) di Karawang, Jawa Barat

18 Januari 2021

Pengiriman bantunan KKP peduli gempa Sulawesi Barat

2 Februari 2021

Peresmian Pusat Inkubasi Bisnis di Politeknik AUP Karawang















7 Maret 2020 Peresmian Pusat Koi dan Maskoki Nusantara



9 Maret 2021 Peresmian Dua Kapal Pengawas Cepat di Batam

14 April 2021 Pelepasan Ekspor Perikanan di Pelabuhan Tanjung Priok

5 April 2021
Rapat Kerja Nasional KKP Tahun 2021
di Bandung Jawa Barat

PRIORITAS KKP TAHUN 2021-2024

6 Mei 2021 Menemani Kunjungan Kerja Presiden RI ke PPN Brondong













10 Mei 2021

Penyelenggaraan Bulan Mutu Karantina ke-6 dengan tema Ikan Sehat, Bermutu untuk mendukung Pemernuhan Protein Masyarakat

10 Juni 2021Konferensi Pers Online terkait *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara,
Laut Sulawesi, dan Selat Malaka

28 Juni 2021 Wisuda Daring Nasional Satuan Pendidikan Menengah (SUPM) lingkup KKP tahun 2021

28 Juni 2021

Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka mewujudkan Maluku sebagai LIN



12 Agustus 2021 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi di Kebumen

19 Agustus 2021 Peresmian Kampung Budidaya Patin di Lebak









8 September 2021 Peluncuran Pasar Laut Indonesia pada Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI)



27 September 2021FGD Program Prioritas KKP dengan
Komisi IV DPR RI

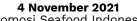


6 Oktober 2021

Peresmian Pasar Ikan Fandoi di Biak Papua

14 Oktober 2021

Mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI pada Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua



Promosi Seafood Indonesia pada Expo 2020 Dubai

18 November 2021

Acara Buyer & Supplier Gathering dan Peluncuran Website Indonesia Seafood serta Brand Indonesia Shrimp













1 Desember 2021 Peresmian Kapal Pemantau Kawasan Konservasi di Kupang



3 Desember 2021 Rapimnas KADIN Indonesia di Bali

27 Januari 2022

Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur dan Pengembangan Kampung Nelayan Maju di Yogyakarta

28 Januari 2022

Kickoff Bulan Cinta Laut di Pantai Parangkusumo Yogyakarta

13 Februari 2022

Penghentian Penambangan Pasir Ilegal di Pulau Rupat, Riau















17 Maret 2022Peresmian *Speedboat* Unit Reaksi
Cepat di Batam



29 Maret 2022Rapat Kerja Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

3 April 2022 Mendampingi Presiden RI mendengarkan Aspirasi Nelayan di Cirebon

20 April 2022

Pencanangan Kampung Budidaya Rumput Laut di Kupang

12 Mei 2022

Penyampaian Program Prioritas KKP berbasis Ekonomi Biru pada Tempo BNI The Bilateral Forum 2022













8 Juni 2022 Soft Launching Kampung Budi Daya Rumput Laut pada rangkaian Hari Laut Sedunia di Wakatobi



16 Jun 2022 Penyematan Brevet Kehormatan Pushidrosal TNI AL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

27 Juni 2022

Penyampaian Komitmen Indonesia melalui Ekonomi Biru pada *United Nation Ocean Conference* (UNOC) 2022

26 Juli 2022

Penandatanganan *Implementing*Arrangement kerja sama kelautan dengan
Kementerian Sumber Daya Alam RRT

4 Agustus 2022 Peresmian Program Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jembrana













19 Agustus 2022 *Kick-off* Penanaman Mangrove
Tahun 2022



31 Agustus 2022Joint Environment and Climate *Minister's Meeting* menuju Presidensi G-20 di Nusa Dua

28 September 2022 Soft Launching Integrated Maritime Intelligent Platform

14 Oktober 2022 Pembukaan Pameran Ikan Hias Air Tawar Kalikan Expo 2022

20 Oktober 2022 Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Bangka Belitung dengan Presiden RI













14 November 2022Launching National Blue Agenda
Actions Partnership di Nusa Dua



2 Desember 2022 Pelepasan Ekspor Ikan Tuna ke Jepang di Biak Numfor dengan Wakil Presiden RI

13 Januari 2023

Peninjauan Progres Pembangunan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan dengan Bupati Kebumen dan Anggota Komisi IV DPR RI

26 Januari 2023

Pelantikan Taruna/Taruni di Politeknik AUP Perikanan Pasar Minggu

2 Februari 2023

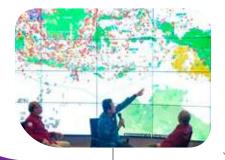
Penandatanganan Kesepakatan Bersama KKP dengan Kementerian BUMN mengembangkan potensi Ekonomi Biru Indonesia

2023









28 Februari 2023Penyampaian Penerapan PNBP Pascaproduksi di Bidang Perikanan Tangkap



9 Maret 2023Peresmian BUBK Kebumen oleh
Presiden RI



19 Maret 2023Pencanangan Bulan Mutu
Karantina 2023 di Semarang

14 April 2023 Kunjungan Kerja meninjau PPN Palabuhanratu dalam rangka pengecekan kesiapan PIT

18 April 2023 Kunjungan ke Balai Pelatihan Konservasi Karimunjawa

8 Mei 2023

Pembukaan 4th Meeting of the Parties The FAO Agreement on Port State Measure (PSMA) di Bali









15 Mei 2023

Mendampingi Wakil Presiden RI dalam meresmikan Kampung Bahari Nusantara di Pulau Untung Kepulauan Seribu



24 Mei 2023

Pembukaan The 1th Indonesia Tuna Conference (ITC-1) & The 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-7) di Bali



19 Juni 2023

Menyambut Kapal Pengawas ORCA 05 di Dermaga Muara Baru

26 Juni 2023 Panen Udang BUBK Kebumen bersama Wakil Presiden RI

8 Agustus 2023 Vocational Goes to Actor (VOGA) Fest 2023

29 September 2023 *Kick-off* Bulan Bakti Kelautan dan
Perikanan









3 Oktober 2023 Menyambut Kapal Pengawas ORCA 06 di PPS Nizam Zachman



27 Oktober 2023 Festival Ikan Hias Nusantara 2023 di Jakarta



9 November 2023 Pelepasan Ekspor 243 ton Hasil Perikanan ke Xiamen, Cina

10 November 2023 Puncak Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

21 November 2023Peringatan Hari Ikan Nasional
2023

23 November 2023Peresmian Kampung Nelayan Modern
Samber-Binyeri oleh Presiden RI













8 Desember 2023 Pembahasan Lima Kebijakan Ekonomi Biru dengan Pemerintah Daerah pada Rapat Kerja Nasional KKP Tahun 2023



28 Desember 2023 Peresmian Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan KP Barakuda 01 dan KP Barakuda 02 di Batam

12 Januari 2024

Pertukaran Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam

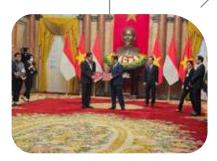
16 Januari 2024

Penandatanganan Dokumen *Strategic Action Program* (SAP) ISLME di Jakarta dengan perwakilan FAO Indonesia dan Timor Leste

5 Februari 2024

Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024

2024









29 Februari 2024 Showcase Piloting Budidaya Rumput Laut Skala Besar di Teluk Ekas



19 Maret 2024 Pertemuan Nasional Kesetaraan *Gender*, Disabilitas dan Inklusi Sosial tahun 2024



30 Maret 2023 Serah Terima Hibah Kapal Rampasan di Pantai Ancol Plengsengan

23 April 2024Peninjauan Perkembangan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin berbasis Kawasan di Karawang

29 April 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024

8 Mei 2024

Peresmian Budi Daya Ikan Nila Salin berbasis Kawasan di Karawang oleh Presiden RI













15 Mei 2024

Peresmian *Project Management*Office 724 KKP dalam rangka
mengawal kebijakan transformasi
tata kelola lobster



22 Mei 2024

Seminar Percepatan Industri Rumput Laut dan Peluncuran Pusat Riset Internasional untuk Rumput Laut Tropis di Nusa Dua

2 Juni 2024

Peresmian Modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Tual

7 Juni 2024 Wisuda SUPM Nasional di Tegal

4 Juli 2024

Pameran *Asian-Pasific Aquaculture* 2024 dengan Wakil Presiden RI di Surabaya







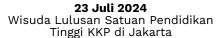






5 Juli 2024

Peluncuran Ocean Accounting Indonesia pada The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Bali



31 Juli 2024

Pembukaan Forum dan Pameran Internasional & Indonesia *Carbon Capture* dan *Storage* ke-2 Kemenkomarves

5 Agustus 2024 Kerja sama KKP dengan Vietnam untuk percepatan transformasi pengembangan budi daya lobster

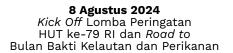
8 Agustus 2024
Peluncuran dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesian* Biodiversity Strategy and Action Plan) 2025 - 2045
8 Agustus 2024
Pelantikan Bapak Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap













12 Agustus 2024 Meninjau IKN menjelang Sidang Kabinet RI



15 Agustus 2024 Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden RI kepada MKP

26 Agustus 2024 *Groundbreaking* pembangunan
Pelabuhan Perikanan Ie Meulee
SKPT Sabang



29 Agustus 2024 Kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar

3 September 2024

Rapat kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR-RI di Senayan













14 September 2024 Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di IKN, Kalimantan Timur



17 September 2024 MKP memperkenalkan inovasi *Coral* Bond untuk penyelamatan terumbu karang di Sidang Umum ke-38 ICRI

17 September 2024

KKP berhasil menggagalkan aksi penyundupan manusia (people smuggling) yang diduga dilakukan menggunakan satu unit kapal ikan di perairan Sumatra Utara

18 September 2024

KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMKP) mengembangkan *Eco Office* di Depok, Jawa Barat

18 September 2024

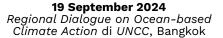
KKP mempersiapkan transformasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII)







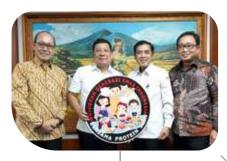






19 September 2024 MKP menghadiri *Global Fishery*

Forum dan Seafood Expo yang diselenggarakan oleh Federal Agency for Fisheries Pemerintah Federasi Rusia



20 September 2024

KKP bersama Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan mensinergikan program Gerakan Memasyarakan Makan Ikan (Gemarikan) dengan Gerakan Edukasi Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa (Genius)

20 September 2024
KKP mempersiapkan digitalisasi sistem
guna penguatan pengawasan intern
melalui pembangunan *Big Data*Analytics

23 September 2024

KKP Segel Dua Resort dan Dua Area Reklamasi Tak Berizin dalam Sepekan

24 September 2024

Indonesia-Korsel Kerja Sama Perkuat Sistem Jaminan Mutu Produk Perikanan













26 September 2024 Silaturahmi dan Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Sentul, Jawa Barat



27 September 2024 Anugerah puncak acara AJSB 2024 dalam rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di *Ballroom* GMB 3

28 September 2024

MKP menyaksikan Presiden Joko Widodo menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara

28 September 2024

KKP meraih penghargaan dari Kepala Bareskrim Polri terkait kinerja sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan

28 September 2024

Panen Raya Modeling Budi Daya Rumput Laut Wakatobi













30 September 2024

MKP melepas ekspor perdana tiga kontainer tuna kaleng dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Kanada, serta meresmikan unit pengolahan ikan (UPI) milik PT Pasifik Masami Indonesia

2 Oktober 2024

KKP Perjuangkan Akses Pasar Perikanan untuk Nelayan Kecil di Forum Asia Pasifik

4 Oktober 2024

MKP memperkenalkan ikan jade perch kepada sejumlah stakeholder perikanan sebagai ikan yang berpotensi dikembangkan di Indonesia

4 Oktober 2024

KKP Perkuat Integrasi Rencana Zonasi Tata Ruang Laut

7 Oktober 2024

Pengukuhan empat guru besar Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta

7 Oktober 2024

KKP Tertibkan Perizinan Rumpon di WPPNRI













8 Oktober 2024 Pembukaan pertemuan The 6th International Marine Spatial
Planning (MSP) Forum di Nusa Dua



9 Oktober 2024

MKP melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, pulau terluar yang terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura



Kita harus dapat memastikan hasil perikanan laut yang ditangkap di perairan Indonesia sehat, terjamin kualitasnya, aman dikonsumsi, dan memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Sumber daya perikanan salah satu potensi ekonomi yang layak dikembangkan dengan memperhatikan keberlanjutan.

swtrenggono, 8 Februari 2021







.01

Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 iuta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km2, luas landas kontinen 2,8 juta km², dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018).

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak,

gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber Daya Ikan (SDI) di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis di antaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari SDI laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengan Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budi daya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budi daya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budi daya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budi daya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin.

Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budi daya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budi daya air tawar 2,8 juta ha (15,8 persen), lahan budi daya air payau 2,96 juta ha (16,5 persen) dan lahan budi daya laut 12,12 juta ha (67,7 persen). Pemanfaatan potensi lahan perikanan budi daya baru mencapai 1.069.223 ha (pemanfaatan 6.0 persen), yang terdiri atas pemanfaatan lahan budi daya laut 102.254 ha (0,8 persen), pemanfaatan lahan budi daya tambak 679.448 (22.9 persen), dan pemanfaatan lahan budi daya air tawar 287.521 (10,2 persen) (Kelautan dan Perikanan dalam Angka, KKP 2022).



Peran Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Mendukung aktivitas perekonomian

Nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh laut Indonesia mencapai USD 180 miliar per tahun

Sumber Kaczan dkk. (2023)

Sumber pangan

Lebih dari 50% kebutuhan protein masyarakat dipenuhi oleh sektor perikanan

Sumber Kaczan dkk. (2023)

Penyedia lapangan pekerjaan

Laut Indonesia berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi 7 juta orang

Sumber World Bank (2021), WTTC (2020)

Kontributor perekonomian nasional

Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional adalah sebesar 7,92% pada tahun 2022

Sumber BPS dan Kemenkomarves (2024)

Penyangga lingkungan

Laut berperan sebagai penyangga lingkungan karena kehadiran ekosistem lamun, rumput laut, dan terumbu karang



Bab 1

Tantangan di Sektor Kelautan dan Perikanan



Pembangunan di kawasan pesisir yang tidak bertanggung jawab dan aktivitas perikanan yang destruktif berdampak pada:



50% luas ekosistem mangrove terdegradasi



40% tutupan lamun terancam hilang

Sumber: Kaczan dkk. (2023)



Kenaikan suhu permukaan laut 1-1,2°C pada tahun 2050

Perubahan Iklim



2.000 pulau terancam hilang pada 2030 akibat se*a level rise*



Periode ulang La Nina dan El Nino singkat (**2-3 tahun** sekali)



Terjadi peningkatan konsentrasi CO2 (372ppm menjadi **413ppm**)



80% terumbu karang mengalami bleaching pada tahun 2030



Frekuensi, intensitas, dan durasi cuaca ekstrim meningkat

Sumber: Kaczan dkk. (2023), BMKG (2023)



35% stok ikan Indonesia mengalami over-exploitation pada tahun 2022

IUU dan Overfishing



USD 4 miliar per tahun, estimasi kerugian dari *illegal fishing* di Indonesia

Sumber: Kaczan dkk. (2023), IOJI (2020)





Peringkat 5 negara penghasil sampah laut



0,2-0,55 juta ton per tahun sampah plastik masuk ke laut Indonesia



USD 450 juta per tahun, estimasi kerugian akibat polusi sampah plastik

Sumber: World Bank (2021), APEC (2020), Meijer dkk. (2021)

Philosophy Ekonomi Biru

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan **ekologi sebagai panglima** yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kitaserta akan menjadikan Indonesia sebagai **poros maritim dunia**



Melindungi laut dan memberi ruang hidup bagi sumber daya hayati di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan.



Menjadi **episentrum serapan karbon dunia**, yang berkontibusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global.



Menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi Champion di pasal global, yang berdaya saing tinggi dan diproduksi melalui cara-cara yang ramah lingkungan.

Kebijakan Ekonomi Biru untuk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan



Triple Win Kebijakan Ekonomi Biru

Ocean Health

Memastikan terjaganya kualitas dan kesehatan lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dari ancaman-ancaman termasuk degradasi dan tekanan sektor ekonomi



Ocean Prosperity

Menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat kelautan dan perikanan

Ocean Wealth

Memastikan ketersediaan produksi pangan tanpa memberi tekanan ekstra bagi ekosistem laut di tengah kebutuhan yang semakin meningkat melalui penangkapan yang terukur dan peningkatan produktivitas budi daya yang berkelanjutan



Melalui Aksi Bulan Cinta Laut, pa<mark>nt</mark>ai dan la<mark>ut sen</mark>antiasa akan terjaga kebersihannya, ikannya melimpah dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pantai dan laut yang bersih memberikan berkah bagi nelayan dan kita semua.

Foto Ibu Iriana Joko Widodo bersama Ibu Wury Ma'ruf Amin dan para anggota OASE KIM membersihkan sampah di pantai yang berada di Kawasan Taman Suroboyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/10/2023)





Tambak Udang Berbasis Kawasan merupakan skema budi daya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Proses produksinya didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan yang sesuai dengan konsep budi daya terintegrasi melalui pendekatan konsep hulu-hilir, korporasi perikanan budi daya, zero waste, hilirisasi produk perikanan budi daya, akuakultur modern 4.0, serta melibatkan seluruh unsur, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Bapak Presiden Jokowi meresmikan tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah (9/3/2023)



"Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya laut begitu besar dan berlimpah harus dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat".

Mari kita jadikan KKP sebagai kementerian yang luar biasa kinerjanya.

swtrenggono, 23 Desember 2020



.02

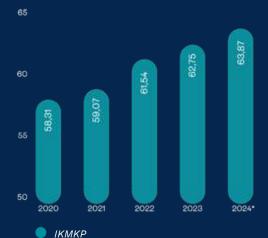
Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

70



Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP 2024*: anaka target Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (IKMKP) adalah indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan (KP) di Indonesia. Kinerja IKMKP dihitung berdasarkan 14 indikator yang merupakan turunan dari dua dimensi yaitu dimensi sosial dan kelembagaan serta dimensi ekonomi. Dimensi sosial dan kelembagaan terdiri dari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolah dan pemasaran perikanan, kelompok masyarakat pengawas, jumlah kelompok pelaku utama yang meningkat kelasnya dan jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya KP. Sedangkan untuk dimensi ekonomi terdiri dari Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan, Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan, Nilai Tukar Petambak Garam, Volume Ekspor Produk Perikanan, Volume Impor Perikanan, Angka Konsumsi Ikan, dan Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan. Laporan kinerja 5 tahun KKP ini hanya menampilkan capaian IKMKP secara umum dan secara khusus menampilkan dimensi ekonomi dari nilai tukar pelaku usaha.

Indeks Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan tahun 2020 sebesar 58,31 menjadi 62,75 di tahun 2023 dan terus ditargetkan meningkat di tahun 2024 sebesar 63,87. Sepanjang tahun 2020-2023 IKMKP tumbuh positif rata-rata sebesar 2,48 persen.



Bab 2 ____ 49

A

Rata-Rata Nilai Tukar Nelayan (Indeks)

NTN tumbuh positif sebesar 1,7 persen pada tahun 2020 s.d 2023. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid namun berangsur meningkat pada tahun 2021 s.d 2023. Hal ini menunjukkan komitmen kuat KKP terhadap upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pada bulan Juli 2024, terdapat peningkatan indeks yang diterima pada nelayan perairan umum khususnya komoditas belut sebesar 0,69 persen, namun terjadi penurunan Indeks yang diterima (It) untuk komoditas tongkol dan selar sebesar 0,12 persen dan indeks yang dibayar (Ib) kelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,05 persen, sehingga NTN hanya meningkat sebesar 0,07 persen dari bulan sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

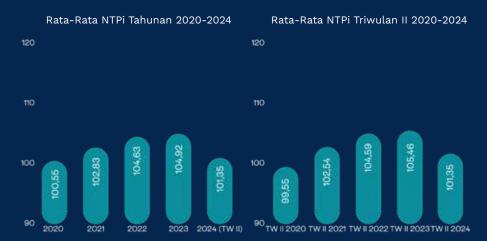


B

Rata-Rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Indeks)

NTPi tumbuh positif sebesar 1,43 persen pada tahun 2020 s.d 2023. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid namun berangsur meningkat pada tahun 2021 s.d 2023. Hal ini menunjukkan komitmen kuat KKP terhadap upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

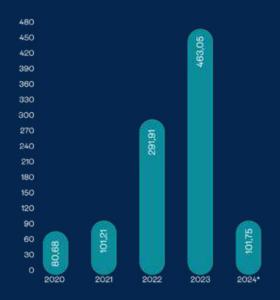
Pada bulan Juli 2024, NTPi hanya meningkat 0,14 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan harga rumput laut dan ikan nila, penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga dan Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Namun penurunan Indeks yang dibayarkan (Ib) lebih besar dari indeks diterima (It).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Bab 2 _____ 51

C Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)



Sumber : Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 2024

2024* : angka target



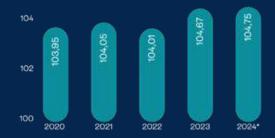
NTPG mengalami kenaikan signifikan terutama pada tahun 2023 yang menembus 463,05. Hal ini disebabkan peningkatan harga garam sejak Februari 2023 menjadi 10 kali lipat sehingga pendapatan petambak garam meningkat.

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

110

108

106



Sumber : Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2024 2024* : angka target



NTPHP mengalami kenaikan sebesar 0,7 persen selama 2020-2023. Hal ini didorong oleh peningkatan kualitas dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan.

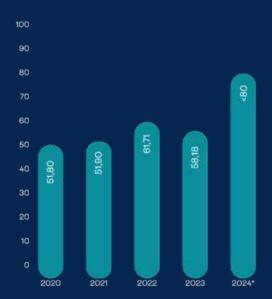
Bab 2 _____ 53



Sumber daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

(%)



Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap, 2024

2024* : angka target



Pemanfaatan tangkapan ikan masih dibawah Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (≤80) yang artinya sumber daya ikan dimanfaatkan secara keberlanjutan.

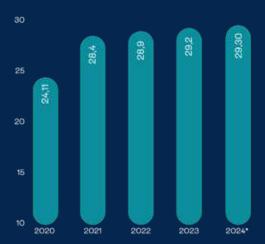
Bab 2 ____ 55

Luas Kawasan Konservasi

(juta Ha.)

Luas Kawasan konservasi Perairan 2020-2024

35



Sumber: Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 2024

2024* : angka target



Luas Kawasan Konservasi meliputi Luas Kawasan Konservasi dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2024 dan/atau dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah. Luas Kawasan konservasi terus meningkat yaitu sebesar 24,11 juta hektar di tahun 2020 menjadi sebesar 29,27 juta hektar di tahun 2023.

Peta Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2023

Capaian Indikator Keberhasilan

2023 Kawasan konservasi yang Luas kawasan konservasi 29,2 16,5 dikelola secara laut (juta Ha) berkelanjutan (juta Ha) 571 711 716 572 713 718 573 0,04 juta Ha merupakan kawasan konservasi perairan darat Kawasan Konservasi Ditetapkan 22,2 juta Ha Kawasan Konservasi Dicadangkan 7 juta Ha

2023

Zona 1 WPP 711 2020 2023 4,68 4,52

juta Ha

Zona 2 WPP 716, 717 2020 2023 2,58 2,89 juta Ha juta Ha

Zona 3 WPP 714, 715, 718 2023 2020 8,93 12,49 juta Ha juta Ha

juta Ha

Zona 4 WPP 572, 573 2023 2020 5,24 5,66 juta Ha juta Ha

Zona 5 WPP 571 2023 2020 0,09 0,09 juta Ha juta Ha

Zona 6 WPP 712, 713 2023 2020 2,76 3,42 juta Ha juta Ha

Sumber KKP (2024)

Bab 2

Ocean Accounting

Sistem manajemen data spasial dan non-spasial terintegrasi yang mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia beserta perubahan neracanya akibat interaksinya dengan kegiatan ekonomi

Ocean Accounting



Ocean Accounting menjadi perangkat teknologi terbaru KKP yang dapat menampilkan **nilai ekonomi sumber daya laut** suatu wilayah, sekaligus nilai ekologi dan sosialnya.
Peluncuran Ocean Accounting oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam 5th Global Dialogue of the Global Ocean Accounts Partnership di Bali menjadi simbol komitmen Indonesia untuk menjaga laut.



KKP mengupayakan Kawasan konservasi Laut yang telah ditetapkan dapat terlihat manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan terkelola dengan baik.

Bab 2



Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan

Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 sebesar Rp290,58 Triliun sedangkan PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar Rp555,04 Triliun.

Nilai PDB Perikanan ADHK Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp139,62 triliun sedangkan PDB Perikanan ADHB sebesar Rp264 Triliun.

PDB Perikanan Atas Harga Konstan

PDB Perikanan atas Harga Konstan Tahun 2019-2024 (*y-on-y*) (Rp. Triliun)

400,00

500.00

300,00

200,00 100.00 0,00







PDB Perikanan Berdasarkan Harga Konstan Triwulan II Tahun 2019-2024 (Rp. Triliun)

500,00 400,00

300.00

200,00

100,00 0.00









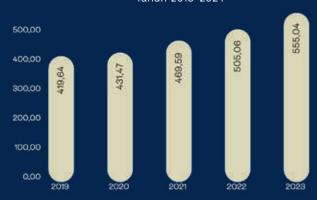
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

PDB Perikanan ADHK:

- Menggambarkan pertumbuhan riil sektor perikanan secara objektif.
- Tidak terpengaruh oleh perubahan harga dan inflasi.
- Digunakan untuk melihat pertumbuhan riil sektor perikanan dari tahun ke tahun.

PDB Perikanan Atas Harga Berlaku

PDB Perikanan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2024



PDB Perikanan atas Dasar Harga Berlaku Triwulan Triwulan II Tahun 2019 s.d 2024 (Rp. Triliun)

300.00 200,00 100,00 0.00

PDB Perikanan ADHB:

500,00

400,00

- · Menggambarkan nilai ekonomi perikanan secara aktual pada tahun ters<u>ebut.</u>
- Terpengaruh oleh perubahan harga dan inflasi.
- · Digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi perikanan.

Bab 2 61

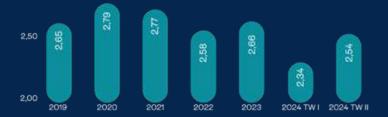
Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional (%)

Tahun 2019 - Triwulan II Tahun 2024 (ADHB)

4,00

3.50

3.00



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

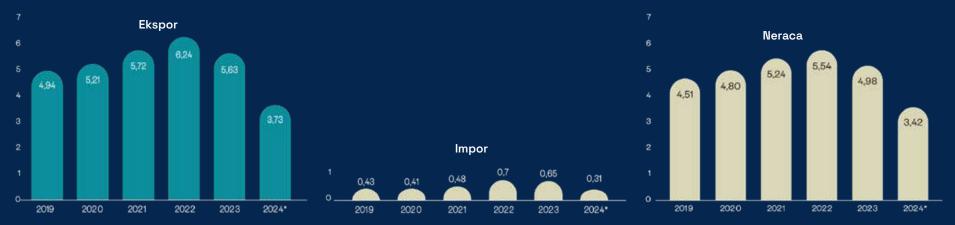


Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional Tahun 2023 sebesar 2,66 persen, atau lebih tinggi daripada Tahun 2022 (2,58 persen). Sedangkan pada TW II Tahun 2024 kontribusi PDB Perikanan sebesar 2,54 persen atau lebih tinggi dari TW I Tahun 2024 sebesar 2,34 persen.

Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia (USD Miliar)

Ekspor merupakan salah satu indikator kinerja utama KKP yang mengindikasikan tingkat keberhasilan KKP dalam upayanya mendorong penyerapan produk perikanan nasional oleh dunia internasional. Capaian ekspor akan menjadi gambaran seberapa penting produk dari sektor perikanan nasional dapat terserap oleh konsumen di luar negeri. Peningkatan ekspor produk kelautan dan perikanan nasional akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan nasional.

Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2019 - Agustus 2024



Sumber: BPS Diolah Ditjen PDS-KKP (479 HS 2017 atau 507 HS 2022 Januari – Desember 2023. Kurs 1 Dollar : Rp. 15.544,* Tahun 2024 : Januari – Agustus. Kurs 1 Dollar : Rp. 15.544,-

Dalam lima tahun terakhir (2019-2023) nilai ekspor produk perikanan mengalami kenaikan rata-rata mencapai 3,67 persen.

Januari-Desember 2023, **NILAI EKSPOR** produk perikanan Indonesia mencapai **USD** 5,63 miliar (Rp 87,5 triliun). **NILAI IMPOR** mencapai **USD** 0,65 miliar (Rp 10,11 triliun). **NERACA PERDAGANGAN** produk perikanan mengalami **SURPLUS** sebesar **USD** 4,98 miliar (Rp 77,39 triliun).

Januari-Agustus 2024, NILAI EKSPOR produk perikanan Indonesia mencapai USD 3,73 miliar (Rp 59,65 triliun). NILAI IMPOR mencapai USD 0,31 miliar (Rp 5,05 triliun). NERACA PERDAGANGAN produk perikanan mengalami SURPLUS sebesar USD 3,42 miliar (Rp 54,060 triliun).

Bab 2 ____ 63

A

Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2019-2024*

(USD miiliar)

Berdasarkan negara tujuan ekspor hasil perikanan, tren pertumbuhan nilai ekspor tahun 2019-2023 ke Amerika Serikat sebesar 2,31 persen, Tiongkok sebesar 8,79 persen, ASEAN 6,8 persen, Uni Eropa 1,84 persen, Jepang 1,53 persen dan negara lainnya 4,88 persen. Untuk tahun 2023, nilai ekspor hasil perikanan ke Amerika Serikat sebesar USD 1,91 miliar, Tiongkok sebesar USD 1,14 miliar, Jepang sebesar USD 0,69 miliar Asean sebesar USD 0,67 miliar, Uni Eropa sebesar USD 0,34 miliar dan negara lainnya sebesar USD 5,63 miliar.



Sumber: BPS diolah DJPDSPKP; *) angka sementara s.d Agustus 2024

B Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2019-2024*

(USD miiliar)

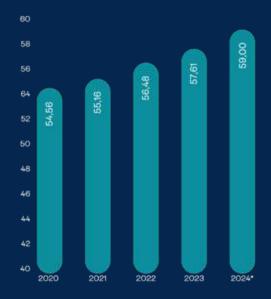
Berdasarkan komoditas utama ekspor hasil perikanan, tren pertumbuhan tahun 2019-2023 rumput laut 13,93 persen, cumi-sotong-gurita 8,91 persen, rajungan kepiting 7,92 persen, tuna-tongkol-cakalang 6,41, udang sebesar 1,22 persen dan komoditas lainnya 2,98 persen. Nilai ekspor pada tahun 2023 berdasarkan komoditas utama, udang sebesar USD 1,73 juta, tuna-tongkol-cakalang sebesar USD 93 ribu, cumi-sotong-gurita USD 76 ribu, rajungan-kepiting USD 45 ribu, rumput laut USD 43 ribu dan komoditas lainnya USD 1,33 juta.



Sumber: BPS diolah DJPDSPKP; *) angka sementara s.d Agustus 2024

Bab 2 ____ 65

Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun)



Sumber data: Susenas, diolah oleh Ditjen PDSPKP 2016-2022: Capaian final; 2023: angka prognosa; 2024 : angka target



Safari Gemarikan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, SDN 1 Ngablak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Januari 2022

Konsumsi ikan merupakan konsumsi ikan per kapita secara nasional (setara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode 1 tahun. Konsumsi ikan sepanjang tahun 2020-2023 terus meningkat yaitu sebesar 54,56 kg/kapita/tahun di tahun 2020 menjadi sebesar 57,61 kg/kapita/tahun di tahun 2023. Pencapaian kinerja angka konsumsi ikan didukung dengan pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Promosi Produksi Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri.



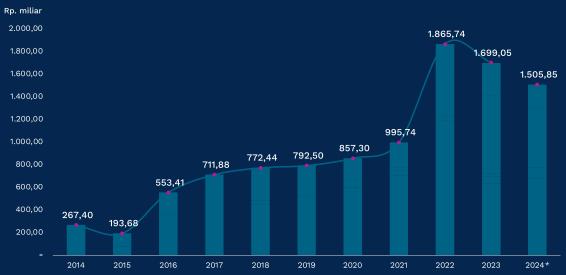
Peringatan Hari Ikan Nasional dalam rangka mengajak masyarakat untuk rutin mengonsumsi ikan, terutama bagi para generasi muda yang merupakan masa depan bangsa. Selain rasanya enak, ikan memiliki kandungan gizi yang baik untuk daya tahan tubuh hingga meningkatkan kecerdasaan otak anak. Upaya peningkatan angka konsumsi ikan ini juga bagian dari ikhtiar menghadirkan generasi berkualitas dalam menghadapi bonus demografi.

Foto Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-10, Riau, (21/11/23)

PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

KKP mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2023 terus melejit naik yaitu sebesar Rp857,30 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp1,699 triliun di tahun 2023. Sampai dengan 3 Oktober 2024 PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan tercatat sebesar Rp 1.412,46 dan diperkirakan terus naik sampai akhir tahun 2024.





Tenaga Kerja yang Terlibat di Sektor Kelautan dan Perikanan

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta sertifikasi pengendalian mutu dan karantina ikan.

Tahun 2024, target tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan sebesar 486.684 orang.

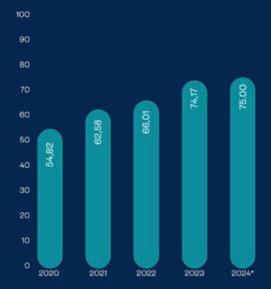


Bab 2 ____ 69



Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat

Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)



Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP 2024*: angka target



Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) terdiri dari jumlah lulusan pendidikan yang menunjukkan jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan dan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI.

Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan pada DUDI terus meningkat yaitu tahun 2020 sebesar 54,82 persen menjadi 74,17 persen di tahun 2023 dan ditargetkan menjadi sebesar 75 di tahun 2024.

Bab 2 _____ 71



Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Bertanggung jawab

WPP NRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan sebuah konsep penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan di zona tertentu dengan kuota penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan. Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota per kapal (ouput control) serta hasil tangkapan pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kuota (catch limit).

Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung PIT, antara lain:

- a. Sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi penangkapan ikan secara elektronik (e-PIT) kepada seluruh pelaku usaha di daerahnya.
- b. Analisis dan evaluasi (anev) terhadap perizinan berusaha yang ada saat ini baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Analisis dan evaluasi pelaksanaan penarikan PNBP sumber daya alam perikanan pascaproduksi.
- d. Menyelesaikan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan bagi kapal yang selama ini perizinan berusahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut, antarprovinsi, atau antarnegara.



Kunjungan kerja MKP ke Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, yang menjadi salah satu lokasi pengembanaan modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Kepulauan Aru, Maluku (3/6/2024)

Pada Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo, menjadi salah satu lokasi pengembangan modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Kepulauan Aru, Maluku.

Bab 2 _____ 73

Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir mencakup RZ Kawasan Antar Wilayah, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT dan Kawasan RZ KSNT Non PPKT, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Laut.

Sampai dengan tahun 2023 telah diselesaikan penataan ruang laut sebanyak 93 kawasan dan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 21 kawasan sehingga capaian kumulatif penataan ruang laut yang dapat diselesaikan tahun 2020-2024 sebanyak 114 kawasan.













Sumber : Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 2024

2024* : angka target



Bab 2

Capaian Kinerja Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

2023

467

Capaian Indikator Keberhasilan

Dokumen KKPRL

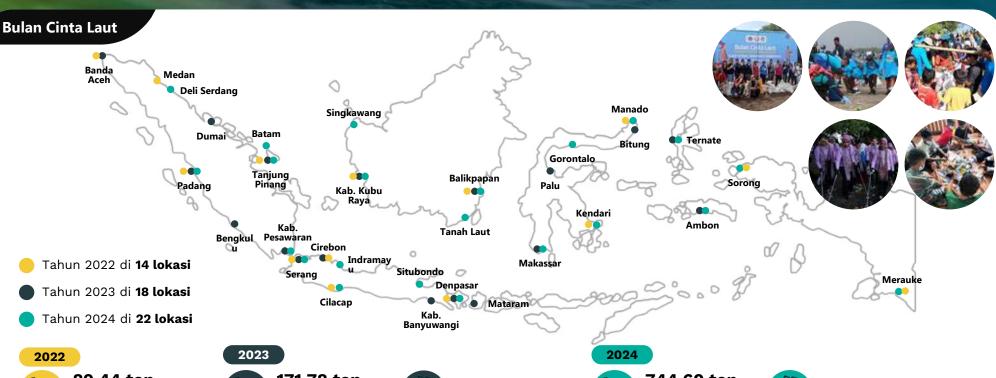
155	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi	32		Hak Atas Tanah telah diterbitkan	58	0	Pesisir dan pulau-pulau kecil/teruluar yant	17
	pesisir (kawasan)						terbangun (kawasan)	
	Persentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100	T	Pulau yang telah diproses perizinan usahanya (pulau)	22		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	52
	Terbit Perda Integrasi RZWP3K dengan RTRWP (provinsi)	15		Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	14	F.J.	Komunitas Masyarakat hukum adat tradisional dan lokal yang terfasilitasi	9

2023

Sumber KKP (2024)

2023

Capaian Kinerja Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir





89,44 tonTotal sampah plastik laut terkumpul



1.508 orangJumlah nelayan yang terlibat aktif



171,78 tonTotal sampah plastik laut yang terkumpul



Rp 60.802.383 Ekonomi sirkuler



744,60 tonTotal sampah plastik laut yang terkumpul



Rp 212.664.904Ekonomi sirkuler



1.350 orangJumlah nelayan yang terlibat aktif



1.763 orangJumlah nelayan yang terlibat aktif



Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Produksi Perikanan (Ton)

Produksi perikanan di tahun 2020 mencapai 21,83 juta ton dan terus meningkat menjadi 24,73 juta ton di tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,37 persen.

Produksi perikanan s.d triwulan II Tahun 2024 sebesar 11,82 juta ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 3,3 juta ton dengan komoditas terbesar tongkol, cakalang, dan tuna. Sedangkan produksi ikan budi daya sebesar 3,4 juta ton dengan komoditas terbesar nila, udang dan lele. Untuk produksi rumput laut sebesar 5,14 juta ton.





Sumber: satudatakkp. *Tahun 2023 : angka sangat sementara; ** Tahun 2024 : angka Estimasi hingga Triwulan II-2024

Capaian Kinerja Perikanan Tangkap

Capaian Indikator Keberhasilan

Produksi perikanan tangkap (juta ton)

7,77

2023

PNBP Perikanan 0,74 Tangkap (Rp triliun)

2023

Kinerja logistik produk perikanan (indeks)

73,31

2023



Tingkat kepatuhan pelaku **97,96**



Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

5,49

Volume produk olahan (juta ton)

7,38



Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105,4



Nilai ekspor hasil 3,91 perikanan tangkap (USD miliar)



Nilai Tukar Pengolah Hasil 104,7



Proporsi tangkapan jenis 58,2 ikan dalam batas biologis aman (%)



Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)

57,61



WPPNRI yang 11 melaksanakan PIT (WPP)

Nilai investasi sektor perikanan tangkap (Rp triliun)

1,5

Sumber KKP (2024)

Modeling Kampung Nelayan Modern

Pada tahun 2023, modeling Kampung Nelayan Modern telah dibangun di Desa Samber-Binyeri, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua dan Pulau Pasaran, Kota Karang, Prov. Lampung

Desa Samber Binyeri



Lokasi Desa Samber Binyeri, Kab. Biak Numfor, Papua



Total intervensi Rp 22,1 miliar

Pulau Pasaran



MPUNG NELAYAN MODERN

Lokasi Pulau Pasaran, Kota Karang, Lampung



Total intervensi Rp 5,29 miliar



Pabrik es

Jalan akses



Bengkel nelayan





Dermaga



Gudang beku



Pedestrian











24 November 2023. Modeling ini Kampung Nelayan Modern di Desa Samber Binyeri diresmikan oleh Presiden Joko Widodo



5 September 2024. Pengiriman perdana ikan (14 jenis ikan, antara lain Tuna, Cakalang, Marlin, dan ikan karang) sebesar 13,325 ton ke Semarang oleh Koperasi produsen Samber Binyeri Maju

Bab 2 81

Capaian Kinerja Perikanan Budi Daya

Capaian Indikator Keberhasilan

Produksi perikanan budi

daya (juta ton)

(Rp juta)

2023

16,97

4,91

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

104,8

2023

miliar)

Nilai ekspor hasil

perikanan budi daya (USD

57,61

2023

1,72





Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

5,49

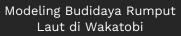
Modeling Budi Daya

Pendapatan rata-rata

pembudi daya per bulan











Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)



Nilai investasi sektor perikanan budi daya (Rp triliun)

3,21

Modeling Budidaya Udang Berbasis Kawasan

2028 Kebumen, Jawa Tengah 75 Ha



____ 83

Modeling Budidaya Tilapia Berbasis Kawasan

2028 Karawang, Jawa Barat

84 Ha



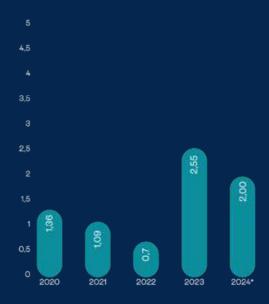
Modeling Budidaya Rumput Laut Berbasis Kawasan

2028 Wakatobi, Sulawesi Tenggara 50 Ha



Bab 2 ____ 85

Produksi Garam



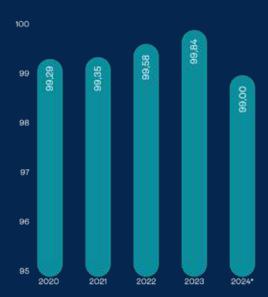
Sumber : Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 2024

2024* : angka target



Produksi garam tahun 2020-2023 tumbuh positif dengan kenaikan rata-rata 69,55 persen. KKP berkomitmen meningkatkan produksi garam rakyat melalui kerja sama dengan sektor swasta dan industri untuk memaksimalkan program Pemberdayan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat seperti pembangunan washing plant, tunnel garam, Gudang Garam Rakyat (GGR) dan integrasi lahan garam.

Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor



Sumber : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 2024

2024* : angka target



Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 99,29 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 99,84 di tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor didukung melalui surveilan untuk pengendalian titik kritis penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), penerapan *in-process inspection* di unit pengolahan ikan, dan pengujian kesesuaian terhadap standar produk akhir (*end product testing*), infrastruktur mutu laboratorium terutama dalam akreditasi dan penambahan ruang lingkup pengujian kimia, mikrobiologi dan *organoleptic* serta peningkatan kerjasama untuk memperkuat jejaring antar laboratorium Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kinerja laboratorium.

Bab 2 _____ 87

Dana yang Disalurkan untuk Pelaku Usaha KP (RpTriliun Rupiah)

Dana yang disalurkan untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri dari pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan Lembaga keuangan non bank kepada UMKM kelautan dan perikanan dan penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP.

Upaya yang dilakukan KKP untuk meningkatkan penyaluran dana kepada pelaku usaha antara lain melalui pembinaan dan pendampingan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank Penyalur KUR dan PT. PNM, serta edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Realisasi penyaluran dana (akses permodalan) yang disalurkan kepada pelaku usaha terus meningkat yaitu sebesar Rp5,45 triliun di tahun 2020 menjadi Rp7,7 triliun di tahun 2023 dan ditargetkan tahun 2024 sebesar Rp10,85 triliun.





Rp5,45 triliun 2020



Rp8,56 triliun 2021



Rp10,49 triliun 2022



Rp7,7 triliun 2023



Rp10,85 triliun **2024***

Sumber : Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan 2024 2024* : anaka taraet





Sumber. Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan Tahun 2024 (diolah KKP) 2024*: data s.d Triwulan III Tahun 2024



Akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro untuk pelaku usaha Kelautan dan Perikanan

Tahun 2020-2023 penyaluran modal usaha melalui KUR dan UMi sebesar Rp 31,68 triliun dengan pertumbuhan 18,57 persen. Sampai dengan triwulan III sebesar Rp6,061 triliun terdiri dari KUR sebesar Rp5,51 triliun dan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp0,54 triliun.

KKP bekerja sama dengan Perbankan dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan sekaligus terus memperbaiki skema penyaluran berkordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, demi memperluas akses permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Bab 2 ____ 89

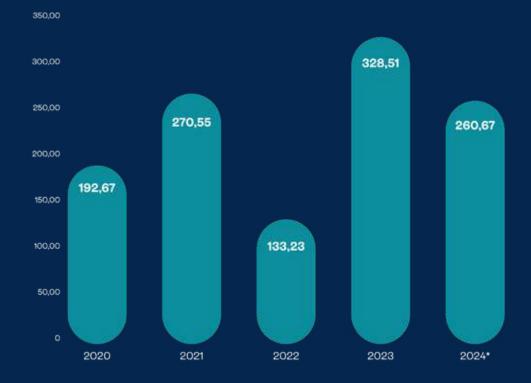


Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP (Rp Miliar)

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, KKP menyalurkan permodalan dana bergulir berbentuk Badan Layanan Umum - Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan (BLU-LPMUKP) sebagai solusi mudah permodalan berbagai usaha kelautan dan perikanan.

Selama tahun 2020 sampai dengan 30 September 2024 telah disalurkan Rp1,185 triliun dana bergulir kepada 2.453 debitur di 34 Provinsi

Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU-LPMUKP (Rp.miliar)



Sumber: BLU LPMUKP, data s.d 30 September 2024



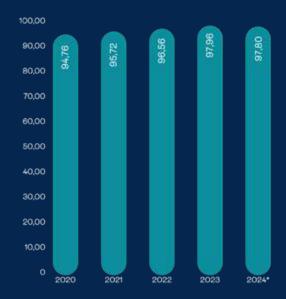
Saya menegaskan mendukung penuh pelaku usaha perikanan Indonesia untuk bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Saya meminta jajaran KKP untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan agar dapat eksis di pasar dunia. Baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Foto MKP menyerahkan Pinjaman Modal Usaha dari BLU LPMUKP kepada pelaku usaha perikanan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi, (23/4/2021)



Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Efektif

Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)



Sumber : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2024

2024*: angka target



Capaian persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%) terus mengalami peningkatan, hal ini seiiring dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsistensi pengawasan SDKP yang secara rutin dilakukan dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengawasan dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan diantaranya melalui operasi pengawasan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan operasi kapal pengawas perikanan terhadap kapal *IUU Fishing*.

Bab 2 ____ 93



Operasi Pengawasan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) Tahun 2024

Sebaran Lokasi Pengagalan Penyelundupan BBL



Modul Penyelundupan BBL





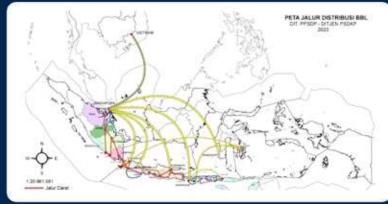




Empat Lokasi Rawan



Modus Penyelundupan BBL: Jalur Darat, Jalur Laut dan Jalur Udara



Capaian Indikator



Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 22 kali di 11 lokasi



Nilai BBL yang diselamatkan sebesar Rp.266 Miliar



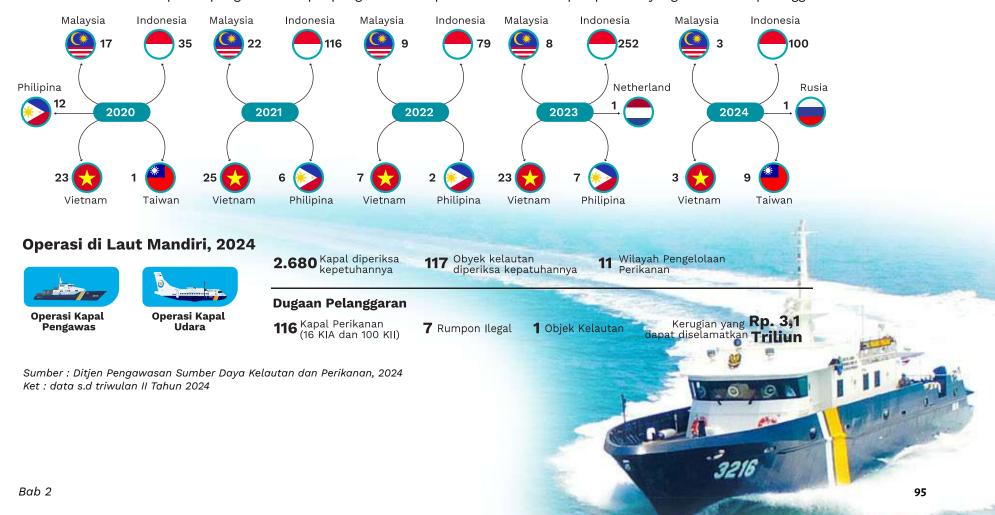
Jumlah BBL sebanyak 2 juta BBL

Sumber : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2024 Ket : data s.d triwulan II Tahun 2024

B

Kapal IUU Fishing yang Ditangkap

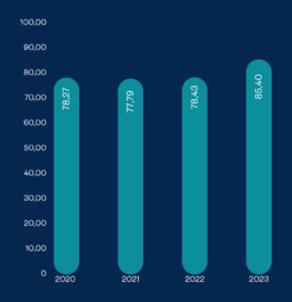
KKP terus melakukan operasi pengawasan kapal pengawas dan operasi udara terhadap kapal ikan yang melakukan pelanggaran.





Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP



Sumber: Kementerian PAN dan RB

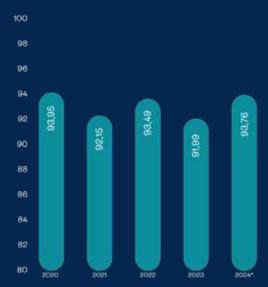
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Capaian Indeks Reformasi KKP terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 78,27 di tahun 2020 menjadi sebesar 85,4 di tahun 2023 hal ini seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah diperbaiki di lingkungan KKP.



Bab 2 _____ 97

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP



Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan *2024 : angka target

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
- b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95;
- c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA >70



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.



Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (governance) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional. berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.



.03

Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Sepanjang tahun 2020-2024 KKP terus berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja sebagaimana Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi antara lain melalui penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja dengan memangkas Eselon III, IV dan V baik di Tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), melantik pejabat administrasi (Eselon III/IV/V) yang terdampak penyederhanaan birokrasi kedalam Jabatan Fungsional baik di lingkungan pusat maupun Unit Pelaksanan Teknis, dan menetapkan peta proses bisnis KKP berdasarkan Perpres dan Organisasi Tata Kerja KKP pasca penyederhanaan birokrasi.



Foto Pelantikan Pejabat Eselon I dan II lingkup KKP (13/4/2023)



Sumber: Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, KKP

Eselon V

2020

177

Pegawai

2021-2023

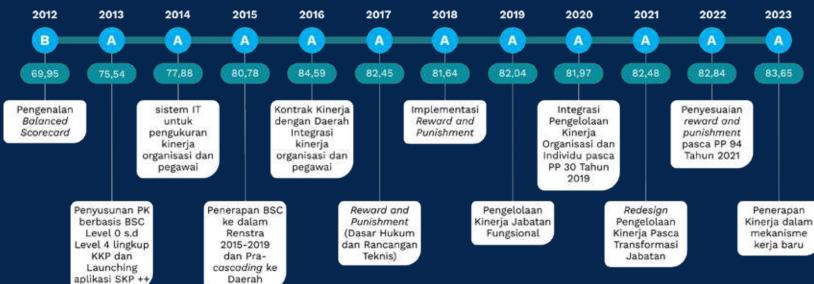
132

Pegawai

Nilai SAKIP KKP

Penguatan akuntabilitas kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui upaya penyempurnaan kinerja yang dimulai dari tahun 2012. Ini berdampak pada hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, sejak tahun 2013 KKP memperoleh predikat A dan terus ditingkatkan hingga saat ini.





Sumber: Kementerian PAN dan RB

Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).



Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan yang merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP (19/10/2023)









Sumber: Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KKP

Opini WTP dapat KKP pertahankan sejak tahun 2021 s.d tahun 2023. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit kerja untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan programprogram ekonomi biru yang menjadi andalan KKP mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.







Bab 3

Indeks Sistem Merit

Dalam melaksanakan sistem merit KKP telah melakukan perencanaan kebutuhan Aparatur Sistem Negara (ASN) telah disusun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan jumlah pegawai yang akan pensiun, Kebijakan internal dalam pemenuhan kebutuhan pegawai dan melaksanakan pengadaan secara terbuka dan kompetitif, kebijakan dan program pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta dan sistem informasi yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit.



Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara

TELAH MENGISI JABATAN PIMPINAN TINGGI MELALUI MEKANISME MANAJEMEN TALENTA

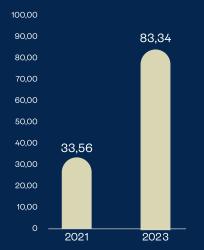


Penghargaan atas keberhasilan KKP dalam mengawal sistem merit dengan hasil penilaian yang sangat baik, dimana KKP bisa mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi tanpa seleksi terbuka melalui mekanisme manajemen talenta

Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Indeks Sistem Merit dilakukan penilaian selama 2 tahun sekali oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Indeks Kualitas Kebijakan KKP

Indek Kualitas Kebijakan mengalami kenaikan yaitu sebesar 33,56 di tahun 2021 menjadi sebesar 83,34 di tahuh 2023. KKP terus melakukan optimalisasi tata Kelola dan kapasitas manajemen kebijakan melalui kelengkapan data dukung dalam proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan dan memperkuat koordinasi teknis antar eselon I dan Lembaga Administrasi Negara.



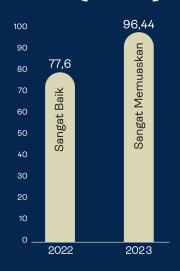
Sumber: Lembaga Adminstrasi Negara



KKP memperoleh Penghargaan sebagai lokus pilot project Lab Kebijakan dari LAN RI

Bab 3 _____ 107

Indeks Reformasi Hukum (Nilai)



Kategori Nilai Predikat

AA : >90 - 100 Sangat Memuaskan

A : >80 - 90 Memuaskan BB : >70 - 80 Sangat Baik

B : >60 - 70 Baik CC : >50-60 Cukup C : >30 - 50 Kurang PERTEMUAN NASIONAL
UMENTASI DAN INFORMASI HUKU
OPMENT CONTENT CREATOR (LDC
TAHUN 2023

ional Bebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Mela

Dak a, 12 Oktober 2023





JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik Penghargaan Juristica Award 2023

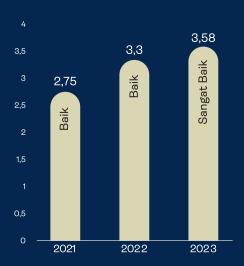
Instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Terdapat 4 variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum, yaitu tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundangundangan yang berkualitas dan kualitas regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dan penataan data base peraturan perundangundangan.

Indeks Reformasi Hukum baru dilakukan di tahun 2022.

Indeks SPBE

Penerapan SPBE sebagai key driver transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE sehingga ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas.



Sumber: Kementerian PAN dan RB



KKP telah memiliki dashboard Portal.kkp.go.id yang telah mengintegrasikan proses manajerial KKP seperti persuratan, manajemen pengetahuan, employee selft service (cuti dan perjalanan dinas)

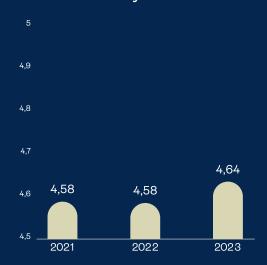


E learning KKP sebagai dashboard peningkatan kapasitas SDM KKP berbasis elektronik (pelatihan, diklat)

Bab 3

Indeks Pelayanan Publik & Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik

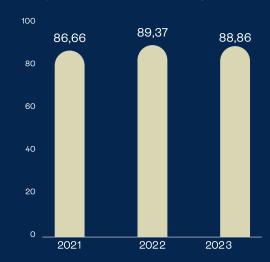




Inovasi Fuji Lestari (Fish Apartement untuk jadikan laut sehat, nelayan hebat dan mandiri) oleh BBPI Semarana

Sumber: Ombudsman RI

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik





KKP mendapatkan Predikat
Kepatuhan Tinggi Tahun 2023
oleh Ombudsman Republik
Indonesia dan berhasil
masuk peringkat ke 6 dari
27 Kementerian dengan
hasil penilaian sebesar
86,66 sekaligus masuk
kategori Zona Hijau. Predikat
Kepatuhan Tinggi diberikan
kepada KKP atas penilaian

kinerja 20 produk pelayananan (layanan administrasi pusat) dengan hasil 19 produk layanan dari 10 Direktorat lingkup KKP mendapatkan kategori Hijau.

Indeks BerAKHLAK

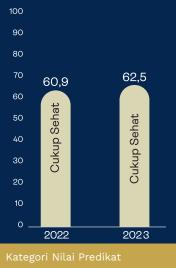
Upaya yang telah dilakukan KKP

Penyiapan perangkat pembelajaran *core value* BerAkhlak

Persiapan penyelenggaraan pelatihan Pelaksanaan pelatihan core value berakhlak terhadap ASN (secara daring/MOOC)

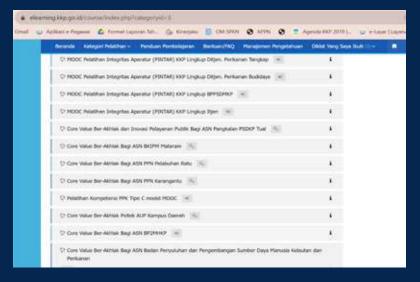
Evaluasi pasca pelaksanaan pelatihan *core* value berakhlak

Pelaksanaan penilaian mandiri *Employee* engagement



Sehat : 75% - 100%
Cukup Sehat : 50% - 74,9%
Tidak Sehat : 25% - 49,9%
Sangat Tidak Sehat : 50% - 74,9%

Sumber: Kementerian PAN dan RB





Inovasi Fuji Lestari (Fish Apartement untuk jadikan laut sehat, nelayan hebat dan mandiri) oleh BBPI Semarang

Bab 3

Potensi sektor kelautan memberikan dampak ekonomi sangat besar bagi negara kita. Diperlukan terobosan dengan berfikir *out of the box t*anpa melupakan kedaulatan dan keberlanjutan ekosistem laut agar potensi yang besar itu bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan bangsa.

swtrenggono, 30 Desember 2020



.04 Torehan Prestasi

Penghargaan dan Prestasi Kkp 2020-2024

2020

Bhumandala Award 2020

Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020 (inovasi pelayanan publik serta inovasi di masa pandemi Covid-19).

Herudi *Technical Commite Award* (HTCA)
Tahun 2020 untuk Komite Teknis Produk
Perikanan Nonpangan.

MURI "Makan Ikan Serentak di Lokasi Terbanyak di Seluruh Indonesia".

Anugerah ASN Inspiratif (salah satu ASN KKP yaitu Arif Wibowo yang berasal dari Balai Riset Perikanan, Perairan Umum, dan Penyuluhan Perikanan Palembang berhasil meraih Top 3 PNS Inspiratif.

Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) salah satu program prioritas nasional KKP terpilih sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB Tahun 2020.

2021

Capaian Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK atas LK KKP).

BKN Award 2021 (Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi).

Anugerah Metokrasi denganPredikat Sangat Baik.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB. Kompetensi Inovasi Pelayaann Publik (KIPP) Kategori Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.

Anugerah Keterbukaaan Informasi Publik Tahun 2021 dengan Predikat A.

Penghargaan di Bidang Media Digital Tahun 2021 "Top Digital Implementattion".

Penghargaan Kategori Mentor pada Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya.

Penghargaan dengan Kategori Sangat Memuaskan dari ANRI untuk Kerasipan.

Penghargaan Gatra Award Tahun 2021 atas kineria pemberantasan Illegal Fishing.

Pengharagaan dari Kementerian Keuangan atas Kinerja KL TA 2020 dengan Kategori Kementerian /Lembaga dengan Kategori Pagu Sedang (Nilai Kinerja KKP berada pada urutan ke-9 dengan nilai 92,33.

Herudi *Technical Commite Award* (HTCA)
Tahun 2021 untuk Komite Teknis Produk
Perikanan Nonpangan.

Penghargaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional KKP berhasil mendapatkan peringkat 11 untuk jenis kategori Kementerian dari total keseluruhan 33 Kementerian Negara dengan pencapaian nilai 80.

2022

Brevet Kehormatan dari Hidro-Oseanografi TNI AL.

BKN *Award* 2022 dari Badan Kepegawaian Negara.

Juara kedua kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.

BKN *Award* 2022 dari Badan Kepegawaian Negara.

Juara ketiga kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja pada kementerian tipe besar.

Top Government Public Relations 2022 dari GPR Institute.

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) tahun 2022 untuk kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah.

Juara pertama kategori Penerbitan Media Internal (*In-house Magazine*) melalui Segara pada Anugerah Media Humas 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bhumandala *Award* BIG dari Badan Informasi Geospasial.

Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori kementerian/lembaga.

Bhumandala Kencana untuk kategori Geoportal terbaik.

Unit Terbaik Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/ Lembaga Tahun 2022 dari Kemenpan-RB.

Penghargaan dan Prestasi KKP 2020-2024

Predikat Akreditasi A dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat

Tokoh Transformasi Tata Kelola Perikanan pada ajang GATRA *Awards* 2022.

Kategori Badan Publik Informatif.

Penghargaan KPK untuk Strategi

Pemberantasan Korupsi KKP di Pelabuhan.

2023

JDIH Terbaik Kelima Tingkat Kementerian. JDIH terbaik Pertama di lingkup Menko Marves.

Capaian Akuntabilitas Keuangan dengan predikat WTP dari BPK RI.

Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Penghargaan pelayanan publik UNPSA PBB dengan tema perubahan iklim.

GERMAS *Award* 2023, Terbaik I, dari Kemenko PMK.

Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Sarpas Ramah Kelompok Rentan dari Kemen PANRB.

Anugerah Reksa Babdha.

Juara Kedua Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dari Kementerian Keuangan. Top Government Public Relations Award. Penghargaan kategori *Excellent Award for Strategic Initiative* pada ajang Indonesia Award 2023.

Tokoh Penggagas Ekonomi Biru pada detikcom *Awards* 2023.

Penghargaan "Government of the Year" pada ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2023.

The Best Leader for Developing Blue
Economy Strategy di HUT KKP Ke-24 dari
iNews Media Group - MNC Group.

Predikat Kualitas Tertinggi atau Zona Hijau dalam penganugerahan Penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman.

2024

Penghargaan 5 Terbaik pada ajang
Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi
Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik untuk
Kelompok Keberlanjutan Inovasi yang
diselenggarakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB). Untuk
Program Pengembangan Usaha Garam
Rakyat (PUGaR) meraih.

Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

KKP mendapatkan penghargaan penyelamatan arsip statistik dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

KKP meraih peringkat pertama pengelolaan pengaduan tingkat Kementerian Tahun 2023 di tingkat nasional melalui aplikasi LAPOR!.

KKP meraih predikat "AA" (Sangat Memuaskan) dalam hasil pengawasan kearsipan tahun 2023.

KKP meraih Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024.

KKP meraih penghargaan dari Bareskrim Polri atas kinerja sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

Bab 4 ____ 115

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KKP

KKP Hat-Trick Raih Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021, 2022 dan 2023.

"KKP terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara".



Perbaiki Tata Kelola Keuangan, BPK Berikan Opini Wajar tanpa Pengecualian atas LK KKP, Tahun 2021



KKP kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian Atas LK KKP

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KKP

Opini WTP dapat KKP pertahankan sejak tahun 2021 s.d tahun 2023. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit kerja untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan programprogram ekonomi biru yang menjadi andalan KKP mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.



KKP kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 (19 Juli 2024)

Bab 4 _____ 117

Kinerja Anggaran K/L Terbaik ke-2

Pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022.

"KKP akan terus berupaya reformasi birokrasi pada unit-unit kerja KKP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan dan anggaran baik pada layanan perizinan, pendampingan usaha bagi Masyarakat kelautan dan perikanan, infrastruktur perikanan hingga peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan."



KKP meraih Penghargaan K/L (Pagu Sedang Kinerja Anggaran) Terbaik Ke 2 dengan kinerja anggaran terbaik (17 Mei 2023)

Torehan Prestasi

Pengelolaan Aset

"Pengelolaan aset yang baik mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik, dan mencerminkan bagaimana K/L mengelola pembangunan dengan kualitas yang bagus karena hal ini mencerminkan kepedulian antargenerasi."

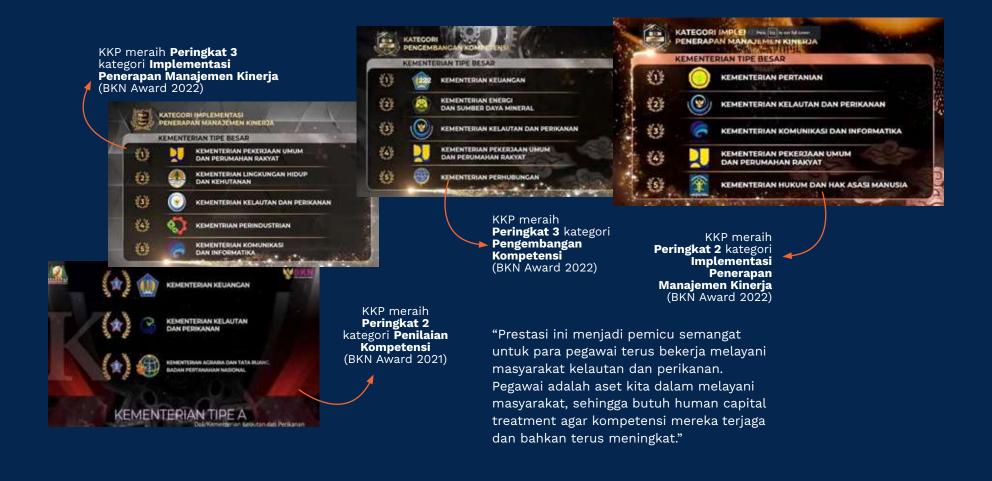




KKP memperoleh penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai Juara Kedua pada kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dari Kementerian Keuangan (23 November 2022)

Bab 4 _____ 119

BKN Award



Penghargaan Manajemen Talenta dari KASN





KKP meraih Penghargaan Manajemen Talenta telah mengisi Pimpinan Tinggi melalui Mekanisme Manajemen Talenta

Penghargaan Excellent Award for Strategic Initiative pada Indonesia Award 2023



Modelling Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, meraih penghargaan kategori *Excellent Award for Strategic Initiative* pada ajang Indonesia *Award* 2023 melalui inovasi dalam rangka meningkatkan produksi udang nasional.

Penghargaan Blue Park Awards dari Marine Conservation Institute



Penghargaan oleh *Marine Conservation Institute* merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya luar biasa Pemerintah Indonesia dalam melakukan konservasi satwa pembohong laut yang telah memenuhi standar tertinggi berbasis sains untuk efektivitas konservasi.

Pelayanan Prima

KKP meraih peringkat 8 Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh 3 Unit Lokus Evaluasi BPSPL Pontianak, PPN Kejawanan dan BUSKIPM.







Bab 4 ____ 123

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Pelayanan Publik











5 Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik KKP memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) terbaik penyedia sarana prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang.

- Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar.
- Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram.
- Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta.

Pengawasan Kearsipan



Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima Sertifikat Akreditasi Kearsipan dengan peroleh Terakreditasi A (sangat memuaskan) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa KKP tertib beradministrasi dan memiliki pedoman yang jelas dalam kearsipan lembaga.



Berdasarkan Pengumuman nomor AK.01.00/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih prestasi dalam bidang kearsipan dengan predikat "AA (Sangat Memuaskan)" pada hasil pengawasan kearsipan 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kategori lembaga setingkat kementerian.

LAMPIRAN NOMOR : AK.01.00/23/2023 TANGGAL: 14 DESEMBER 2023 HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN **TAHUN 2023** KEMENTERIAN NAMA INSTANSI KATEGORI Kementerian Keuangan Republik AA (SANGAT MEMUASKAN) AA (SANGAT MEMUASKAN) 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. AA (SANGAT MEMUASKAN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 4 Kementerian Koordinator Bidang Politik, AA (SANGAT MEMUASKAN) Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia 5 Kementerian Perindustrian Republik AA (SANGAT MEMUASKAN) Indonesia 6 Kementerian Perencanaan Pembangunan AA (SANGAT MEMUASKAN) Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 7 Kementerian Ketenagakerjaan Republik AA (SANGAT MEMUASKAN) Indonesia 8 Kementerian Kesehatan Republik AA (SANGAT MEMUASKAN) AA (SANGAT MEMUASKAN) 9 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kementehan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 11 Kementerian Koordinator Bidang AA (SANGAT MEMUASKAN) Perekonomian Republik Indonesia 12 Kementerian Pertanian Republik Indonesia AA (SANGAT MEMUASKAN) 13 Kementerian Sekretariat Negara Republik AA (SANGAT MEMUASKAN) 14 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah AA (SANGAT MEMUASKAN) Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 15 Kementerian Energi dan Sumber Daya AA (SANGAT MEMUASKAN) Mineral Republik Indonesia

Bab 4 ____ 125

GERMAS Award 2023

Pembudayaan Germas tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Program Germas dilaksanakan melalui enam kegiatan pokok, yaitu peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat.

Melalui Germas, KKP terus berupaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif.



KKP Raih Juara Pertama Germas Award 2023 14 November 2023

KKP Raih Peringkat Pertama Kelola Layanan Publik



KKP meraih peringkat pertama pengelolaan pengaduan tingkat Kementerian Tahun 2023 di tingkat nasional melalui aplikasi LAPOR!

KKP Terima Tiga Penghargaan dari ANRI



KKP mendapatkan penghargaan penyelamatan Arsip Statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yaitu Arsip Statis Kemaritiman, Arsip Statis Hasil Penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Arsip Statis Eks Departemen Kelautan dan Perikanan

Bhumandala Award 2023







KKP berhasil meraih Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori Kementerian/Lembaga, dan Bhumandala Kencana untuk kategori Geoportal terbaik. Penghargaan Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana diberikan kepada KKP atas pencapaiannya dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial.

Pengarustamaan Gender

Predikat Mentor pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.













Bab 4

Logistics Award 2023



SLIN KKP Raih Penghargaan Indonesia Logistics Awards 2023 (15 Oktober 2023)

Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimplementasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diapresiasi Supply Chain Indonesia (SCI).

SLIN telah berperan dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan terintegrasi.

Anugerah Zona Integritas menuju WBK Tahun 2023





UPT BPPMHKP Balikpapan.

Mendapatkan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2023 dari Kementerian PANRB yang akan dilaksanakan pada RBXperience 6 Desember 2023 di Denpasar.

131

Bab 4

Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023





Penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik tahun 2023 dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. KKP berhasil meraih posisi enam atau naik tiga peringkat dari tahun sebelumnya, dengan nilai 88,86.

Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif



KKP mendapat penghargaan sebagai badan publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta.





Bab 4

IPIMTI Awards Tahun 2023





KKP mendapat penghargaan atas Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui penempatan ASN Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pada Tahun 2023 sebesar 36,84% oleh IPIMTI, Jakarta.

Penghargaan Best Leader



Berbagai terobosan yang telah dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan menjadi bukti nyata kepemimpinan visioner Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendorong Indonesia menjadi pemimpin dalam industri ekonomi biru.

Penghargaaan Kearsipan



KKP meraih predikat "AA" (Sangat Memuaskan) dalam hasil pengawasan kearsipan tahun 2023

Bab 4 ____ 135

Penghargaan Indonesia Visionary Leader



Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat penghargaan Indonesia *Visionary Leader* dari MNC Group.



Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin mendapat Penghargaan Indonesia *Visionary Leader* dalam hal *Integrated Surveilance System* berbasis Teknologi dari MNC Group.

Penghargaan Bareskrim Polri



KKP meraih penghargaan dari Bareskrim Polri atas kinerja sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan

Penghargaan JDIHN Tahun 2024



KKP meraih Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024

Bab 4 ____ 137

TIM PENYUSUN

Berlayar dengan Ekonomi Biru Untuk Indonesia Emas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

Pengarah

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

Penyusun

Penanggung Jawab

- 1. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal
- 2. Victor Gustaaf Manoppo, Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- 3. Lotharia Latif, Dirjen Perikanan Tangkap
- 4. Tb. Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Budi Daya
- 5. Budi Sulistiyo, Dirjen PDSPKP
- 6. Pung Nugroho Saksono, Dirjen PSDKP
- 7. Tornanda Syaifullah, Inspektur Jenderal
- 8. Nyoman Radiarta, Kepala BPPSDMKP
- 9. Ishartini, Kepala BPPMHKP

Ketua Tim Penyusun

Andy Artha Donny Oktopura, Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris

Ali Rahmat Iman Santoso, Katimja Pengelolaan Kinerja, Biro Perencanaan

Anggota

- 1. Kusdiantoro, Sesditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- 2. Trian Yunanda, Sesditjen Perikanan Tangkap
- 3. Gemi Triastutik, Seditjen Perikanan Budi Daya
- 4. Machmud, Seditjen PDSPKP



Berlayar dengan Ekonomi Biru Untuk Indonesia Emas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis

142 hlm.; 29,5 cm x 20 cm

ISSN: 3063-9077

Penerbit

Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

Dikeluarkan oleh

Biro Perencanaan, Sekeretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 5. Suharta, Seditjen PSDKP
- 6. Ivy Silfia Irani, Sesitjen
- 7. Rudi Alek Wahyudin, Sekretaris BPPSDMKP
- 8. Hari Maryadi, Ses BPPMHKP
- 9. Siddig Pratomo, Katimja Pengelolaan Kerja Sama, Biro Perencanaan
- 10. Muhammad Ramli, Ketua Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan

- 11. Ade Wiguna Nur Yasin, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor, Biro Perencanaan
- 12. Agus Haryanto, Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Biro Perencanaan
- 13. Benny Khaeruddin, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri, Biro Perencanaan
- 14. Febry Budianto, Ketua Tim Kerja Program, Inspektorat Jenderal
- 15. R. Tono Amboro, Ketua Tim Kerja Program, Ditjen Perikanan Tangkap
- 16. Rokhmad Mohamad Rofiq, Ketua Tim Kerja Program, Ditjen Perikanan Budi Daya
- 17. R Tommy Supratomo, Ketua Tim Kerja Program, Ditjen PKRL
- 18. Budi Yowono, Ketua Tim Kerja Program, Ditjen PDSPKP
- 19. Tri Yuwono, Ketua Tim Kerja Program BPPSDMKP
- 20. Dewi Rukmasari, Ketua Tim Kerja Program, BPPSDMKP
- 21. Sutomo, Ketua Tim Kerja Program, BPPMHKP
- 22. Risman Ferdiansyah, Ketua Tim Kerja Monev BPPMHKP
- 23. Munawar, Pelaksanan Biro Perencanaan
- 24. Meirina Anggraeni, Pelaksana Biro Perencanaan
- 25. Helena Yusfik, Pelaksana Biro Perencanaan
- 26. Ika Yusnita, Pelaksana Biro Perencanaan
- 27. Iksan Zuhry, Pelaksana Biro Perencanaan
- 28. Achmat Marsito, Pelaksana Biro Perencanaan
- 29. Aldwin Valdemar Fuadi, Tenaga Teknis Program Prioritas Menteri KP
- 30. Theresia Aldies Oktavianti, Tenaga Teknis Program Prioritas Menteri KP





